

ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Amelia Latang

mellylatang@yahoo.com

(Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The objective of the research was to find out Organizational Performance in Regional Integrated Licensing Service Official of Central Sulawesi Province. The used theory from Goggin and Joedono, Structure, Human Resources, Financial, Tecnology and Leadership. The method employed in the research was qualitative with 5 informants chosen purposively as sample. The technique of data collection done through observation, interview and documentation. The research results revealed that the implementation organizational Performance of Regional Integrated Licencing Service Official of Central Sulawesi Province have not been maximal due to some dimensions run unwell such as structural dimension not ideal; it still focused on license sector not to service fungcion. Whereas the recources dimension ; it still have double job and need discipline improvement to understand the duty and fungsjon. The technology dimension; it wass already available but still not optimal due to the resourses limit. Financial dimension; basically it was already available but not used as the fungsjon. Mereover, leadership dimension; it was always centered but not democratic. Based on the research result, there were some suggestions as solution for the problem namely; it needs to have a review related to organizational structure to be more oriented to service function;; apparatus resourses have to change their mindset and paradigm, be more innovative, need to add the number of gualified apparatus to avoid double job, conducting education of training for the unqualified tecnical staff with their main duty ,conducting foreign language cources to serve foreign investor, and be more democratic in conducting the leadership duty.

Keywords: *Performance, Quality, Effectiveness*

Format kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut menjadi suatu tuntutan bagi pemerintah daerah baik Kota maupun Kabupaten untuk dapat mandiri agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dilimpahkan pada daerah. lebih jauh lagi UU No.32 Tahun 2004 ini juga menitik beratkan pada otonomi daerah dengan tujuan lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat tercipta pelayanan yang lebih berkualitas yang bisa memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Mencermati kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat maka dibutuhkan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan publik. hal ini

turut didukung pula dengan semakin berkembangnya era keterbukaan masyarakat yang mengakibatkan tuntutan yang lebih banyak kepada birokrasi pemerintah dan aparatnya untuk dapat memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan masyarakat yang mengakses layanan publik adalah faktor penentu berhasil tidaknya kinerja setiap organisasi publik di mata masyarakat. Oleh karenanya pemahaman terhadap pihak yang berkepentingan atau pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat luas sangat diperlukan. Penyelenggaraan pola pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan publik harus disesuaikan. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik diakui memang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah yang di ditetapkan tahun 2009 dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2009, dengan Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Keamanan Berkas, dan Kepastian.

Sejalan dengan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kini membuka peluang besar terhadap investasi yang berasal dari luar daerah, tentu saja beban kerja pelayanan semakin berat dan beragam. Oleh karena itu Kinerja dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu handle kebutuhan publik dalam masalah layanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tentu saja KP2TD masih memiliki sejumlah kekurangan dan kendala dalam bekerja melakukan pelayanan terhadap publik. Apakah sistem yang ada telah berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya atau memang belum berjalan dengan baik sehingga mutu pelayanan belum bisa dikatakan memuaskan masyarakat. Atau, apakah masyarakat belum terlalu paham dengan sistem yang telah dibuat tersebut dan memiliki beberapa kendala sehingga layanan yang diberikan memang terasa belum maksimal dirasakan. Untuk mengatasi semua hal itu, maka diharapkan adanya perbaikan kinerja organisasi pada KP2TD untuk menghasilkan kualitas layanan perizinan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai penerima layanan.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dan kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang berhubungan baik dengan kinerja maupun yang berhubungan dengan kinerja birokrasi, diantara lain sebagai berikut:

1. Rusli. Tesis Pasca Sarjana Untad, dengan judul "Kinerja Pengawas Pertambangan Umum dalam meningkatkan kualitas Layanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah." Metode dalam melakukan penelitian menggunakan Metode kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori dari Agus Dwiyanto.
2. Ika Widya Syari. Dengan judul penelitian Analisis Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. Penelitian ini bertujuan

untuk meneliti dan menganalisis kinerja pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling saat melakukan pemilihan informan dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisa data. Dalam penggunaan teori, peneliti menggunakan teori Kinerja Dessler yaitu Kualitas Pekerjaan, Kuantitas Pekerjaan, Supervisi yang diperlukan, Kehadiran, dan Konservasi.

3. Selvie, Tesis Pasca Sarjana Untad, dengan judul “Analisis Kinerja Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala.” Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana Kinerja Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala, dengan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode analisis data kualitatif dengan Reduksi Data dan Display Data.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam Menganalisa Kinerja Organisasi Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu, calon peneliti menemukan sejumlah kesamaan dengan penelitian dari calon peneliti, yaitu:

1. Fokus: Masalah Kinerja.
2. Metode Penelitian: Kualitatif.

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul: Peneliti terdahulu memilih judul: a). Kinerja Pengawas Petambangan umum dalam meningkatkan kualitas layanan pada Dinas Sumber Energi dan Sumbr Daya Mine Provinsi Sulawesi Tengah b). Analisis Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan c). Analisis Kinerja Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala.
2. Lokus: peneliti terdahulu mengambil lokasi penelitian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, dan Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala.
3. Tiga peneliti terdahulu tidak menggunakan teori Kinerja Organisasi dari Goggin dan Joedono
4. Tahun penelitian: Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2010 dan 2013 sedangkan calon peneliti melakukan penelitian pada tahun 2014.

Dan jika dituangkan kedalam matriks, maka persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat seperti dalam tabel berikut ini:

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Rusli	Kinerja Pengawas Pertambangan umum dalam meningkatkan kualitas layanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.	2010	- Fokus Masalah mengenai Kinerja dan kualitas layanan - Metode Penelitian Kualitatif	- Lokasi Penelitian yang berbeda - Tahun Penelitian 2014 - Penggunaan teori Kinerja oleh Gogin dan Joedono.
2	Ika Widya Syari	Analisis Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu	2012	- Fokus Masalah Kinerja pegawai - Metode Penelitian Kualitatif	- Lokasi Penelitian yang berbeda - Tahun Penelitian 2014 - Penggunaan teori Kinerja oleh Gogin dan Jedono
3	Selvie	Analisis Kinerja Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala	2013	- Fokus masalah mengenai kinerja - Metode Penelitian kualitatif dengan Reduksi Data dan Display Data.	- Tahun Penelitian 2014 - Penggunaan teori Kinerja oleh Gogin dan Joedono.

Di dalam organisasi, terutama pemerintah sangat bergantung kepada kinerja para aparatnya sebagai penyedia layanan. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisa dan mengkaji tentang bagaimana Kinerja Organisasi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ada banyak sekali teori yang bisa dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, namun penulis membatasi hanya melihat pengaruh variable internal organisasi.

Dari variabel yang ada, tidak semua variabel obyek penelitian diungkapkan.

Hanya variabel yang dianggap penting saja (memiliki pengaruh besar) yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian kinerja organisasi. Jika dikaitkan dengan masalah yang dirumuskan, yakni factor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja organisasi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, penulis menggunakan *theoretical frame work* Goggin dan Joedono bahwa struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi, Leadership dan Finansial berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Kantor Perizinan Terpadu daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima factor tersebut bukan merupakan factor yang berdiri sendiri.

Secara garis besar, Joedono (1974: 44) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi antara lain meliputi:

- 1) Faktor kualitas SDM
- 2) Struktur Organisasi
- 3) Teknologi
- 4) Pimpinan dan masyarakat
- 5) Bentuk kepemimpinan.

Sedangkan Goggin (1990: 120) menyatakan bahwa kapasitas organisasi member kontribusi pada keberhasilan implementasi. Kemampuan organisasi akan dipengaruhi (produk dari tiga hal pokok yaitu: Struktur Organisasi, Personel (*Human Resources*) dan Finansial. Tiga hal tersebut bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Berdasarkan pada berbagai pengertian organisasi, maka dapat dikemukakan bahwa organisasi merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari suatu sistem wewenang, tugas, dan tanggung jawab tertentu dalam upaya untuk mencapai tujuan.

METODE

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang dihimpun meliputi data primer berupa hasil wawancara dengan informan, dokumentasi dan observasi. Untuk memperoleh informasi yang dipertanggung jawabkan, maka data yang diperlukan diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu : (a) data primer berasal dari hasil wawancara dengan informan dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan focus penelitian dengan jenis pertanyaan yang menyorot pada 3 aspek model teori organisasi dari Goggin dan Joedono, dan hasil observasi berpartisipasi, (b) Data sekunder berasal dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau lembaga / instansi lain yang terkait terutama yang menyangkut tentang dokumen, peraturan perundang – undangan dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Analisis

data dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu (1) Reduksi data (2) Penyajian data dan (3) Penarikan kesimpulan dan saran-saran penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran umum

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah yang di ditetapkan tahun 2009 dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 72 Tahun 2009, dengan Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Keamanan Berkas, dan Kepastian.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah mengacu Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah "*Sulawesi Tengah Seajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia dalam Pengembangan Agribisnis dan Kelautan Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Tahun 2020*".

Seajar dengan Provinsi maju dalam arti bahwa harapan ke depan sarana dan prasarana pendukung (infrastruktur), peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan provinsi lain sehingga

mengurangi ketimpangan pembangunan di segala bidang dengan daerah lain, sejajar dalam kualitas sumberdaya manusia dengan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Visi tersebut dikedepankan sebagai salah satu upaya untuk mencapai Visi yang secara eksplisit tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Tengah 2005-2025 yaitu “Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan”.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di atas, terlihat bahwa peran dan tugas KP2TD Provinsi Sulawesi Tengah sangat krusial dan esensial dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut.

Seiring dengan harapan tersebut, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan dan mewujudkan Visi Pembangunan Sulawesi Tengah melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi dan sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai KP2TD Provinsi Sulawesi Tengah harapan terwujudnya Sulawesi Tengah sejajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia, tentunya juga dilandasi oleh “*Isu Strategis*” sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa akan datang. Untuk itu, KP2TD Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Visi, yaitu “*Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat, Berkualitas dan Transparan menuju Pelayanan Prima*”.

Pembahasan

Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah

Salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Pelayanan Terpadu pada dasarnya telah diatur melalui Permendagri No. 24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

Dimensi Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. KP2TD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan lembaga teknis Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan PERDA Nomor 03 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Perekonomian
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
5. Seksi Pembangunan
6. Seksi Pemerintahan dan Lain-Lain
7. Tim Teknis.

Struktur organisasi yang ada belum ideal atau sesuai dengan fungsi pelayanan, karena masing – masing seksi tugas pokok dan fungsinya masih berdasarkan sector atau pengelompokan objek yaitu pembagian bidang/seksi berdasarkan kategori izin, struktur yang seperti ini sangat tidak efisien karena beban kerja masing-masing seksi tidak merata sehingga mempengaruhi kinerja staf yang ada pada masing-masing seksi, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja kantor pelayanan perizinan terpadu daerah.

Dimensi Human Resources (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Manusia memilih teknologi, manusia yang mencari modal, manusia yang menggunakan dan memelihara, disamping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing yang berdampak positif. Oleh karena

itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi menjadi hal yang sangat penting.

Potensi SDM pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah masih belum memadai karena adanya rangkap tugas yang dilakukan oleh staf di bidang Perizinan dan Non Perizinan tersebut. Dan sebaiknya staf ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya (pendidikan formalnya). Aparatur harus merubah pola pikir dengan lebih disiplin dan lebih inovatif.

Dimensi Teknologi

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pada pelayanan dengan *Information Teknologi* (IT) seperti Sistem Pelayanan Administrasi Secara Terpadu (SIMPADU), Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan perlengkapan komputer lainnya.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kelembagaan penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan untuk meningkatnya kualitas pelayanannya sangat ditentukan oleh dimensi tampilan fisik yang dimilikinya, karena hal itulah yang mempengaruhi kinerja pelayanannya. Perlu adanya peningkatan penggunaan Informasi Teknologi untuk aparatur dengan mengikutsertakan dalam diklat, seperti Sistem Pelayanan Administrasi Secara Terpadu (SIMPADU) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik (SPIPIE) mengingat kebutuhan yang semakin kompleks dan demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Dimensi Financial

Finansial sebagai biaya atau cost dan anggaran atau budget. Biaya merupakan Sejumlah uang yang disediakan dan

dipergunakan secara langsung untuk mencapai tujuan kegiatan di dalam suatu proses kelembagaan, selain itu finansial atau penganggaran pada dasarnya dikembangkan dalam penyusunan dana yang dibutuhkan untuk mencari suatu ukuran yang menyeluruh yang dapat menggambarkan tingkat kelayakan kinerja program dan kegiatan, dalam finansial/penganggaran pada umumnya di pemerintahan dilihat dari sudut lembaga yang kompetensi program dan kegiatan berkepentingan dalam kelembagaannya.

Anggaran yang telah dialokasikan untuk Tahun 2014 senilai Rp.4.633.786.845,- yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2012 dan tahun 2013, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah mendapat bantuan Dana Dekonsentrasi (APBN) sebesar Rp.600.000.000,-..Anggaran yang dialokasikan sudah mencukupi untuk membiayai program dan kegiatan kantor hanya dalam penerapannya anggaran tersebut belum berbasis kinerja dimana dalam penggunaannya belum berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi.

Dimensi Leadership

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia tersebut dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu.

Kepemimpinan, berkaitan dengan hal-hal untuk mengatasi perubahan. Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi terhadap masa depan, kemudian mengkomunikasikannya kepada setiap orang dan mengilhami orang-orang tersebut dalam

menghadapi segala rintangan..Kepemimpinan yang ada sudah dilakukan secara bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana tugas seorang pemimpin. Namun dalam hal pengambilan keputusan harus mempertimbangkan saran bawahan, lebih demokratis, karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi dan memberikan motivasi kepada bawahan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan Kinerja pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah dapat disimpulkan belum maksimal, karena sebagian dimensi belum berjalan maksimal. Alasannya, dimana untuk Dimensi Struktur Organisasi masih belum ideal, karena masih berjalan ke sektor dan bukan ke fungsi pelayanan. Sedangkan Dimensi Human Resources (SDM) pada dasarnya masih adanya rangkap tugas,selanjutnya SDM yang ada perlu memahami tugas dan fungsinya,serta perlu peningkatan disiplin. Dimensi Teknologi dimana Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan *Informasi Teknologi (IT)* yang kapasitasnya memadai untuk mendukung inovasi ke depannya, namun belum digunakan secara optimal karena keterbatasan SDM. Dimensi Finansial, pada dasarnya sudah mencukupi, tetapi belum maksimal digunakan sesuai dengan fungsi organisasi.. Selanjutnya Dimensi Leadership, Kepemimpinan selalu terpusat perlu mempertimangkan saran dan pendapat bawahan.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dianggap penting :

1. Melakukan penataan kembali struktur organisasi yang ada agar lebih berorientasi pada fungsi layanan;
2. Perlu penambahan Aparatur yang berlatar belakang yang sesuai dengan kebutuhan setiap bidangnya, guna untuk menghindari terjadinya nrangkap tugas, sehingga staf bisa lebih fokus menyelesaikan tugasnya.
3. Mengadakan pendidikan atau pelatihan teknis bagi staf yang belum berkualifikasi dengan bidang tugasnya, dan mengadakan kursus bahasa asing agar aparatur dapat melayani investor dengan baik.
5. Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, pemimpin harus memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkreaitif, berinovatif, pemimpin harus lebih tanggap melihat keinginan dan kebutuhan bawahannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Sultan M,M.Si selaku ketua tim pembimbing dan Ibu Dr.Hj.Mustainah, M.Si selaku anggota tim pembimbing yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan karya ilmiah ini.

Penulis memanjatkan do'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya beliau berdua diberikan limpahan berkah, rahmat dan hidayah atas segala amal ibadahnya atas pemberian bimbingan dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Goggin, Malcolm L., et al.1990. *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Glenview, Illinois. USA: Foresman and Company.
- Joedono, S.B. 1974. *Administrasi Pembangunan. Sebuah Pengantar*. Prisma No.4,4.
- Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.